

## **BAB II**

### **GAMBARAN OBYEK PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatikan Provinsi DIY**

##### **1. Sejarah Berdirinya Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi DIY**

Dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Provinsi sebagai daerah otonom mempunyai beberapa kewenangan, diantaranya kewenangan pengendalian pembangunan regional secara makro.

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan dinas daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008. Dalam rangka mewujudkan kebutuhan masyarakat yang mengalami peningkatan yang sangat pesat atas penyelenggaraan pelayanan transportasi, pos dan telekomunikasi yang aman, tertib, selamat dan handal serta pelayanan atas teknologi informasi sebagai akibat dari meluasnya wilayah aglomerasi ekonomi dan pertumbuhan jumlah penduduk, peran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika perlu ditingkatkan.

Melalui peningkatan kompetensi aparatur, pengembangan prasarana dan sarana baik bidang perhubungan maupun bidang

komunikasi dan informasi, serta peningkatan pengawasan, pengendalian dan pembinaan bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika, sehingga akan tercipta penyelenggaraan pelayanan transportasi berkelanjutan yang mendukung pariwisata, pendidikan dan budaya serta terwujudnya Jogjakarta Cyber Province dan masyarakat informasi yang berbasis pengetahuan di Provinsi D.I. Yogyakarta.

## 2. Visi dan Misi

Dalam rangka upaya untuk membangun kesejahteraan rakyat yang didukung dengan meningkatkan pelayanan jasa transportasi, pos dan telekomunikasi serta pelayanan informatika yang terpadu, tertib, lancar, selamat dan handal perlu dukungan dari instansi terkait, para operator, dan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan visi :

***“Terwujudnya transportasi berkelanjutan yang mendukung pariwisata, pendidikan dan budaya, serta terwujudnya Jogja Cyber Province dan masyarakat informasi yang berbasis pengetahuan di Provinsi DIY”***

Berdasarkan visi dan kondisi yang diharapkan akan terbentuk secara bertahap, maka ditetapkan Misi Pembangunan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi D.I. Yogyakarta sebagai berikut :

3) Meningkatkan prasarana dan sarana transportasi yang berkelanjutan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik.

4) Mendukung peningkatan efisiensi dan efektifitas tata kelola pemerintahan di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang berbasis good governance dengan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal.

a. Tujuan dan Sasaran

Tujuan pada dasarnya merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai pada kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun mendatang. Adapun tujuan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi D.I. Yogyakarta yaitu :

1. Menciptakan pelayanan angkutan berkelanjutan dan terintegrasi guna mendukung pembangunan pendidikan, budaya dan pariwisata.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi yang berkelanjutan.
3. Mewujudkan *connected government*, menjalankan *digital government service (DGS)*, dan meningkatkan *e-readiness* masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat informasi yang berbasis pengetahuan.

Dengan mengacu pada misi dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi D.I. Yogyakarta, maka sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan, yakni target yang akan dicapai dalam lima tahun adalah sebagai berikut :

1. Misi: *Meningkatkan prasarana dan sarana transportasi yang berkelanjutan dalam upaya meningkatkan pelayanan.*

dengan sasaran :

- a. Terwujudnya pelayanan angkutan umum massal yang terjangkau dan berkualitas serta pelayanan angkutan barang yang murah, tertib dan teratur.
- b. Terwujudnya *pengembangan infrastruktur dan sistem transportasi yang efektif, efisien, berteknologi tepat, rendah emisi dengan keselamatan tinggi.*

2 Misi: *Mendukung peningkatan efisiensi dan efektifitas tata kelola pemerintahan yang berbasis good governance dengan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal.*

Dengan sasaran :

Meningkatkan daya tanggap, transparansi, dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan

Cara Pencapaian Sasaran:

Cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan enam kebijakan dan dijabarkan dalam sepuluh program dan empat puluh lima kegiatan.

Kebijakan :

- i. Meningkatkan pelayanan angkutan umum yang terjangkau, berkualitas dan berkelanjutan.

- ii. Meningkatkan penataan system jaringan angkutan umum yang terpadu.
- iii. Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan untuk meningkatkan pelayanan public secara berkesinambungan.
- iv. Memantapkan dan mengembangkan penerapan E-Gov.
- v. Meningkatkan peran masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan public, fungsi control, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan public.
- vi. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan pelayanan berbasis digital government service pada semua sektor pemerintah daerah

Program dan kegiatan:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Penyediaan jasa surat menyurat
3. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
5. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
6. Penyediaan jasa administrasi keuangan
7. Penyediaan jasa kebersihan kantor
8. Penyediaan alat tulis kantor
9. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
10. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

11. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
12. Penyediaan peralatan rumah tangga
13. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
14. Penyediaan makanan dan minuman
15. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
16. Penyediaan jasa keamanan (penjaga malam)

### **3. Struktur Organisasi**

Susunan organisasi telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 48 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi DIY, terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Subbagian Umum
  - b. Subbagian Keuangan
  - c. Subbagian Program dan Informasi
3. Bidang Angkutan Darat, terdiri dari :
  - a. Seksi Angkutan Jalan Antar Kota dan Wilayah
  - b. Seksi Angkutan Perkotaan
  - c. Seksi Angkutan Barang, Sewa dan Kereta Api

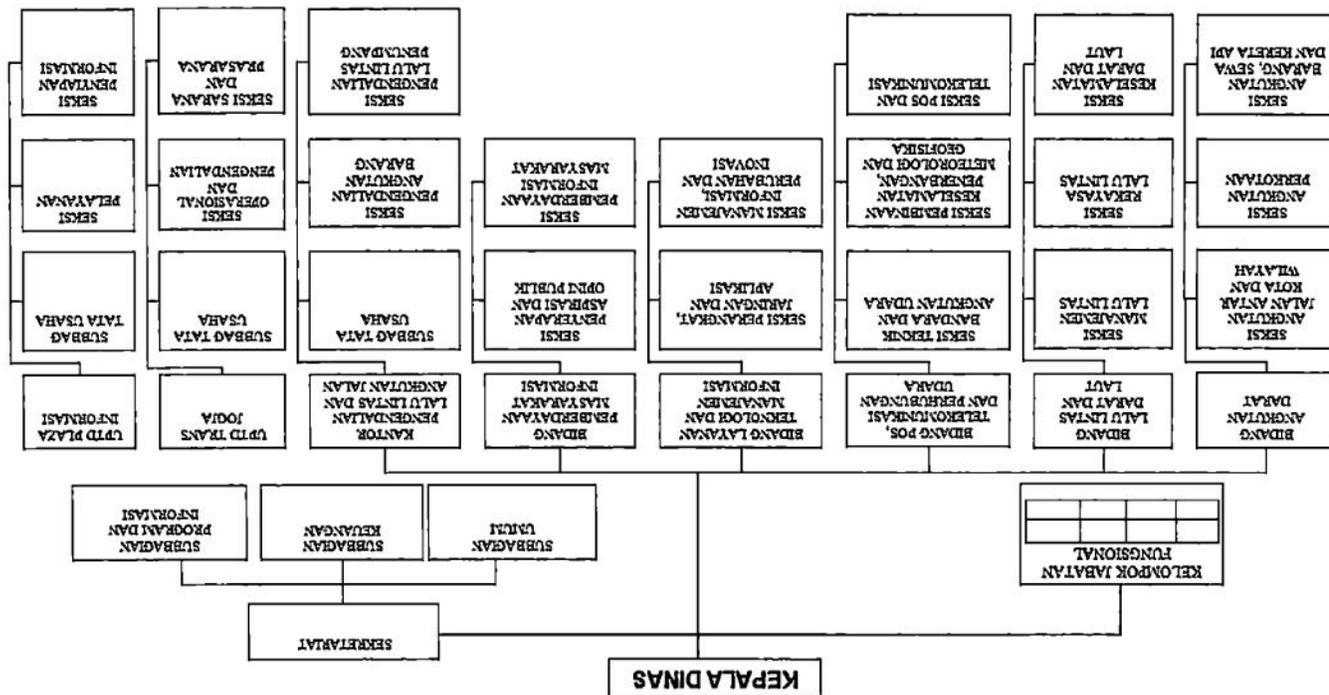
4. Bidang Lau Lintas Darat dan Laut, terdiri dari :
  - a. Seksi Manajemen Lalu Lintas
  - b. Seksi Rekayasa Lalu Lintas
  - c. Seksi Keselamatan Darat dan Laut
5. Bidang Perhubungan Udara, Pos, Telekomunikasi, terdiri dari :
  - a. Seksi Teknik Bandara dan Angkutan Udara
  - b. Seksi Pembinaan Keselamatan Penerbangan, Meteorologi dan Geofisika
  - c. Seksi Pos dan Telekomunikasi
6. Bidang Layanan Teknologi dan Manajemen Informasi, terdiri dari :
  - a. Seksi Perangkat, Jaringan dan Aplikasi
  - b. Seksi Manajemen Informasi, Perubahan dan Inovasi
7. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Informasi, terdiri dari :
  - a. Seksi Penyerapan Aspirasi dan Opini Publik
  - b. Seksi Pemberdayaan Informsi Masyarakat.
8. Unit Pelaksana Teknis Trans Jogja, terdiri dari :
  - a. Kepala
  - b. Subbagian Tata Usaha
  - c. Seksi Operasional dan Pengendalian
  - d. Seksi Prasarana dan Prasarana
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional
9. Unit Pelaksana Teknis Kantor Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- a. Kepala
- b. Subbagian Tata Usaha
- c. Seksi Pengendalian Angkutan Barang
- d. Seksi Pengendalian Lalu Lintas Penumpang
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

**10. Unit Pelaksana Teknis Plaza Informasi**

- a. Kepala
- b. Subbagian Tata Usaha
- c. Seksi Pelayanan
- d. Seksi Penyiap Informasi
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi selengkapnya dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:



#### 4. Tugas dan Fungsi

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas sebagai pelaksana urusan Pemerintah Daerah pada bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika serta kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan pemerintah.

Guna melaksanakan tugas tersebut diatas, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan pengendalian di bidang perhubungan komunikasi dan informatika;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan komunikasi dan informatika;
- c. Pengelolaan angkutan jalan antar kota dan wilayah, angkutan perkotaan, dan angkutan barang;
- d. Pengelolaan manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas serta keselamatan lalu lintas darat dan laut;
- e. Pembinaan keselamatan penerbangan, teknis kebandaraan dan angkutan udara;
- f. Pengelolaan data meteorology dan geofisika;
- g. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian operasional;
- h. Pelaksanaan koordinasi perijinan bidang perhubungan komunikasi dan informatika;

- i. Pelaksanaan pelayanan umum bidang perhubungan komunikasi dan informatika;
- j. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan terhadap pelayanan jasa telekomunikasi;
- k. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, penertiban jasa perposan;
- l. Pelayanan informasi internal birokrasi;
- m. Penyiapan bahan manajemen perubahan dan inovasi;
- n. Pelaksanaan pemantauan dan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang manajemen informasi dan pengembangan komunikasi informasi;
- o. Pemberian fasilitas bidang perhubungan, komunikasi dan informatika Kabupaten/Kota;
- p. Pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang perhubungan komunikasi dan informatika;
- q. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- r. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

## **5. Keadaan Pegawai**

Sumber daya aparatur perhubungan di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Prov. D.I. Yogyakarta terbagi dalam dua golongan yaitu berdasar kepangkatan dan pendidikan.

Dari kuantitas yang ada, pegawai Dinas Perhubungan Prov. D.I. Yogyakarta menurut golongan ruang/kepangkatan dan jenis kelamin terinci sebagai berikut :

1. Jumlah pegawai sebanyak 316 orang yang terdiri dari :
  - a. Golongan IV : 13 orang (Laki-laki 12 orang; Perempuan 1 orang)
  - b. Golongan III : 267 orang (Laki-laki 181 orang; Perempuan 86 orang)
  - c. Golongan II : 35 orang (Laki-laki 32 orang; Perempuan 3 orang)
  - d. Golongan I : 1 orang (Laki-laki 1 orang; Perempuan -orang)
2. Jumlah pegawai menurut pengelompokan
  - a. Menurut Pendidikan
    - Lulusan S2 : 16 orang
    - Lulusan S1 : 97 orang
    - Lulusan D3 : 15 orang
    - Lulusan D2 : 0 orang
    - Lulusan SLTA: 186 orang
    - Lulusan SLTP : 0 orang
    - Lulusan SD : 0 orang
  - b. Menurut Jabatan
    - Struktural : 34 orang
    - Fungsional : - orang
    - Staf : 282 orang